



# RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

DPPKBP3A  
KABUPATEN  
BANYUMAS  
**2023**

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN  
DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2023



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BANYUMAS

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2023 ini dilaksanakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2023.

Penyusunan Renja Perubahan DPPKBP3A Tahun 2023 ini juga sebagai perwujudan penerapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah selama pelaksanaan kinerja dalam satu tahun berjalan setelah mendapatkan evaluasi dan koreksi atas pelaksanaan Renja Induk DPPKBP3A Tahun 2023 yang telah berjalan selama kurang lebih 1 semester/(enam) bulan pertama. Terkait hal tersebut, tentunya secara teknis masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, untuk itu kami mohon koreksi dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan selanjutnya.

Demikian Renja Perubahan DPPKBP3A ini Kami susun, semoga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya dan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa datang.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan sebagai siklus dinamis dipengaruhi kondisi lingkungan strategis regional dan nasional bahkan internasional. Perubahan lingkungan strategis harus dapat diadaptasi dengan perubahan perencanaan untuk menyesuaikan tujuan dan prioritas pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan penyesuaian terhadap berbagai perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 maka Renja dapat dilakukan perubahan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2022, sehingga telah dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2022. Ketidaksesuaian ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan nasional (RPJMN Tahun 2019-2024) dan kondisi pandemi Covid 19 sehingga kemudian telah dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dan dijabarkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023; dan/atau
  - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan (catatan : untuk SKPD dengan kondisi tsb).
2. Penambahan kegiatan baru akibat kebijakan nasional dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan antara lain dengan ditetapkannya Perpres 18 Tahun 2019 tentang RPJMN 2019-2024, dan ditetapkannya Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sehingga telah ditetapkan pula perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, serta adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 tahun 2019, dan keadaan darurat atau keadaan luar biasa seperti halnya Pandemi Covid 19 yang memaksa Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan perencanaan.

Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, maka setiap perangkat daerah wajib menindaklanjuti berbagai perubahan yang terjadi dan menuangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perubahan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Banyumas No 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomer 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Renja Perubahan merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD Perubahan yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Banyumas.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
18. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
19. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventaris Gas Rumah Kaca
20. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
33. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
34. Peraturan Bupati Banyumas No 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomer 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
35. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;
36. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.



### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dimaksudkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2023 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagai pedoman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kab. Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Mensinergikan rencana program dan kegiatan prioritas dengan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023.

### **1.4. SISTEMATIKA**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dan Analisa Kinerja Perangkat Daerah.
- 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.
- 2.3 Review terhadap Renja DPPKBP3A Tahun 2023.

#### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas selama tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dan perkiraan pencapaian target tahun 2023 Triwulan III dan IV. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan Penetapan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2023, dan Capaian Analisis Kinerja sampai dengan indikator kinerja kegiatan triwulan II atau semester I Tahun Anggaran 2023.

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN ANALISA KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Analisis capaian kinerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas sampai dengan triwulan II tahun berkenaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Triwulan II (tahun berjalan)\* Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas

Unit Kerja : DPPKBP3A

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk										
		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,77		1,77		N/A		-	
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk										
		Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0.01		0.01		N/A		-	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				6.588.292.617		6.588.292.617		3.360.735.626		51,01
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100		100		100		100	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		100		50		50	
		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100		100		100		100	
		Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100		100		100		100	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32.049.455		32.049.455		5.310.000		16,57
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang di Susun	Dokumen	4		4		2		50	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.948.631.722		3.948.631.722		2.160.229.564		54,71

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Administrasi Keuangan yang dikelola	Jenis	3		3		3		100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				507.071.000		507.071.000		300.766.148		59,31
		Jumlah Administrasi Umum yang dikelola	jenis	6		6		6		100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.000.000		50.000.000		13.325.000		26.65
		Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3		3		3		100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.807.600.440		1.807.600.440		714.825.514		39,55
		Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3		3		3		100	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				242.940.000		242.940.000		166.279.400		68,44
		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4		4		4		100	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				382.200.000		382.200.000		84.917.718		22,22
		Rata-rata jumlah anak perkeluarga	anak	2.30		2.30		N/A		-	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				141.000.000		141.000.000		3.344.800		2,37
		Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	dokumen	1		1		0		0	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				241.200.000		241.200.000		81.572.918		33,82
		Jumlah informasi data mikro keluarga setiap desa	desa	331		331		331		100	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				11.840.042.500		11.840.042.500		3.832.502.750		32,37
		Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100		100		100		100	
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	42		42		47,04		72,39	
		Presentase Kampung KB yang terfasilitasi	%	80		80		30,21		112	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				2.294.050.000		2.294.050.000		95.920.050		4,18
		Jumlah Penyuluhan oleh PLKB/PKB yang dilaksanakan	Kegiatan	640		640		366		57,19	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				626.600.000		626.600.000		174.800.000		28
		Jumlah Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	orang	331		331		331		100	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				4.685.492.500		4.685.492.500		2.265.392.700		48,35
		Jumlah fasilitas kesehatan yang tercukupi alat dan	unit	70		70		70		100	



No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		obat kontrasepsinya									
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				4.860.500.000		4.860.500.000		1.296.390.000		26,67
		Jumlah Kampung KB yang aktif	Desa	200		200		100		50	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				8.564.685.000		8.564.685.000		1.143.533.500		13,35
		Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	18,52		18,52		7,41		40	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				8.409.291.000		8.409.291.000		3.188.006.000		37,95

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan	Kelompok	20		20		20		100	
	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak										
		Nilai Kabupaten Layak Anak		650		650		N/A		-	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		71,94		71,943		N/A		-	
	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan										
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		71,94		71,93		N/A		-	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				215.000.000		215.000.000		76.577.000		35,62
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100		100		100		100	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	22		22		22		100	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				18.000.000		18.000.000		2.703.000		15,02
		Jumlah OPD yang menerapkan PUG	Lembaga	29		29		29		100	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				122.000.000		122.000.000		58.456.000		47,91
		Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	orang	11		11		11		100	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				75.000.000		75.000.000		15.418.000		20,56

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berperan aktif	lembaga	45		45		45		100	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				195.604.000		195.604.000		82.029.409		41,94
		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100		100		100		100	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				65.100.000		65.100.000		43.106.500		66,22
		Jumlah penanganan kasus kekerasan	kasus	73		73		15		179,45	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		perempuan yang ditindaklanjuti									
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				100.504.000		100.504.000		15.397.159		15,32
		Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	kasus	17		17		11		64,71	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		30.000.000		23.525.750	78,42	0
		Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang berperan aktif	Lembaga	1		1		1		100	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				45.000.000		45.000.000		0		0
		Persentase keluarga yang mendapat pengarahannya terkait peningkatan kualitas keluarga	%	0,036		0,036		N/A		-	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				45.000.000		45.000.000		0		0
		Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	kegiatan	2		2		0		0	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>				7.000.000		7.000.000		813.000		11,61
		Persentase perangkat daerah	%	42,86		42,86		0		0	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan									
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				7.000.000		7.000.000		813.000		11,61
		Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia	laporan	1		1		0		0	
	Meningkatkan kualitas perlindungan anak										
		Nilai Kabupaten Layak Anak		650		650		N/A		-	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				75.000.000		75.000.000		29.405.600		39,21

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar yang aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	%	100		100		100		100	
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				75.000.000		75.000.000		29.405.600		39,21
		Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar dan aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	Lembaga	28		28		28		100	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				218.600.000		218.600.000		50.718.445		23,2
		Rasio anak korban kekerasan	%	0.007		0.007		0.006		120	



No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				64.600.000		64.600.000		3.300.000		5,11
		Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	Kasus	50		50		19		168	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				154.000.000		154.000.000		47.418.445		30,79
		Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	anak	63		63		34		53,97	

Dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2023 masih terdapat permasalahan dalam pencapaian kinerja pelayanan yang ada di DPPKBP3A Kabupaten Banyumas, antara lain:

1. Persentase pemakaian kontrasepsi jangka panjang di Kabupaten Banyumas masih didominasi oleh akseptor perempuan  
Berdasarkan capaian salah satu indikator program KB yaitu Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada triwulan II telah mencapai 47,04 % dari target sekitar 42%. Namun angka itu masih didominasi oleh akseptor wanita yang menggunakan MOW, IUD. Masih sedikit akseptor KB MKJP dari kalangan pria (MOP).
2. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di akhir tahun 2022 naik, namun masih dibawah capaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan salah satu kabupaten tetangga  
Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2022 yaitu (72,77) dari target 71,94. Capaiannya naik dari tahun sebelumnya 2021 (70,10), namun masih lebih rendah dari capaian Pemerintah Provinsi Jateng (73,78) dan Kabupaten Banjarnegara (73,80).
3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak  
Dengan terbentuknya UPTD Teknis Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Banyumas, masyarakat menjadi terbuka dan berani untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat bahkan kasus di Banyumas menjadi viral dalam pemberitaan media massa, hal ini menyebabkan jumlah kasus kekerasan masih menunjukkan frekuensi yang cukup tinggi.
4. Belum adanya peningkatan status Kabupaten Layak Anak untuk Kabupaten Banyumas  
Sampai dengan akhir tahun 2022 perolehan predikat Kabupaten Layak Anak hasil evaluasi dan penilaian Kementerian PPPA masih pada berada pada jenjang Pratama , yang berarti masih mendapat nilai kurang dari 600 (<600). Secara fisik Kabupaten Banyumas layak mendapatkan kenaikan predikat, namun kenyataan penilaian masih berada pada level Pratama. Hal ini bisa disebabkan karena kelembagaan yang menjadi bahan penilaian dalam KLA dimana lembaga-lembaga tersebut belum terbentuk di Kabupaten Banyumas.

Dalam menyelesaikan permasalahan dan meminimalisir faktor-faktor penyebabnya, maka tindakan yang diambil antara lain:

1. Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan melalui rapat koordinasi internal guna membahas setiap permasalahan yang muncul setiap bulannya;

2. Peningkatan advokasi dalam pelayanan KB dan kesadaran masyarakat untuk mendukung program pemerintah di bidang KKBPK;
3. Peningkatan koordinasi dan efektivitas terhadap perangkat daerah lainnya dan organisasi perempuan sebagai ujung tombak peningkatan pemberdayaan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga melalui pemberian advokasi/sosialisasi terkait kesetaraan gender;
4. Peningkatan pelaksanaan kegiatan pencegahan kasus kekerasan baik kepada anak maupun perempuan melalui kerjasama dengan pihak lain (legislatif dan/atau swasta), hal ini dimaksudkan agar volume pemberian KIE terkait penanganan kasus kekerasan di masyarakat semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingginya kasus kekerasan yang akan terjadi;
5. Penyiapan dan perencanaan kegiatan yang baik dalam mendukung Kabupaten Layak Anak meningkat lebih baik melalui pemetaan permasalahan dan faktor-faktor penyebab belum maksimalnya Nilai Kabupaten Layak Anak;
6. Memaksimalkan penyerapan anggaran, khususnya Dana Transfer Pusat (DAK) melalui kegiatan-kegiatan yang efektif sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023;
7. Melaksanakan perubahan/pergeseran anggaran, agar efektivitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah lebih meningkat lagi.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 28.066.026.117,00 dengan 10 program dan 24 kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut pada semester pertama sudah terealisasi sebesar Rp 10.720.028.877 dengan capaian kinerja fisik sebesar 39,7 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 38,3 %, dengan penyerapan anggaran terendah dan tertinggi yaitu pada kegiatan:

1. Penyerapan terendah pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan penyerapan anggaran 0 %;
2. Penyerapan tertinggi pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan penyerapan anggaran 94,63 %.

Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, silpa anggaran DPPKBP3A Kabupaten Banyumas adalah sebesar Rp. 17.345.997.240,00.

## **2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**

Isu-isu strategis yang masih perlu mendapatkan penanganan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 adalah:

1. Belum tercapainya penanganan stunting secara optimal di Kabupaten Banyumas;
2. Belum optimalnya pelaksanaan program Bangga Kencana;
3. Menurunnya kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunnya kualitas perlindungan anak;

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, DPPKBP3A mempunyai tugas dan peran strategis dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka peningkatan kinerja organisasi melalui dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai dan tentu saja anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya Tujuan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

### **1. Tugas Pokok**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

## 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- c. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- d. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum jenis pelayanan yang diberikan DPPKBP3A adalah informasi dan pemikiran strategis terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi:

1. Pemberian edukasi, komunikasi dan informasi terkait Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

2. Pemberian edukasi, komunikasi dan informasi terkait pembangunan, pemberdayaan, perlindungan perempuan serta kualitas keluarga;
3. Pencegahan dan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta optimalisasi pemenuhan hak-hak anak.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kualitas pelayanan dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana;
2. Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, perlindungan perempuan serta kualitas keluarga;
3. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
4. Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana melalui peningkatan sarana dan prasarana penunjang dan peningkatan peran serta masyarakat.
5. Peningkatan pemenuhan hak-hak perempuan melalui pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan yang berkelanjutan dengan berbasis pada peningkatan kualitas keluarga.
6. Peningkatan upaya pencegahan dan pelayanan kasus kekerasan terhadap anak serta optimalisasi pemenuhan hak-hak anak.

### **2.3. REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA DPPKBP3A TAHUN 2023**

Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka diperlukan penyesuaian indikator tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Perubahan Renstra DPPKBP3A, sebagaimana tertuang dalam tabel-tabel dibawah ini.

Matrik Perubahan Kinerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[TUJUAN]Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk				
[INDTUJUAN]	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1.77	
[SASARAN]Menurunnya laju pertumbuhan penduduk				
[INDSASARAN]	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0.01	
[PROGRAM]X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.272.377.788
[INDPROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	
[INDPROGRAM]	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	
[INDPROGRAM]	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	
[INDPROGRAM]	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26.328.761
[INDKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.540.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.788.761
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.295.515.893
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.171.405.893
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	33	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				124.110.000

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				742.621.651
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.483.200
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				72.102.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.563.500
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				256.302.451
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				360.170.500
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				41.482.500
[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				7.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.482.500
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0



Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.790.843.983
[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.605.200
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.696.238.783
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				375.585.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				236.850.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	130	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel				5.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				93.710.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.025.000

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	
[PROGRAM]PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				672.600.000
[INDPROGRAM]	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	2.40	
[KEGIATAN]Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				138.000.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Kebijakan	1	
[SUBKEGIATAN]Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				97.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	
[SUBKEGIATAN]Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal				19.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen	1	
[SUBKEGIATAN]Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				21.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kelompok	1	
[KEGIATAN]Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				534.600.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah informasi data mikro keluarga setiap desa yang dilaporkan	informasi	331	
[SUBKEGIATAN]Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				15.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	1	
[SUBKEGIATAN] Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				56.960.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	
[SUBKEGIATAN] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				293.400.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1	
[SUBKEGIATAN] Pengolahan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				169.240.000

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	12	
[PROGRAM]PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				11.564.691.500
[INDPROGRAM]	Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	
[INDPROGRAM]	Presentase Kampung KB yang terfasilitasi	%	80	
[INDPROGRAM]	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	42	
[KEGIATAN]Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.459.250.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah Penyuluhan oleh PLKB/PKB yang dilaksanakan	Keg	620	
[SUBKEGIATAN] Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				118.145.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	5	
[SUBKEGIATAN] Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal				41.400.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	
[SUBKEGIATAN] Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				150.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	2	
[SUBKEGIATAN] Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				352.855.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	2	

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[SUBKEGIATAN]Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK				716.850.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	12	
[SUBKEGIATAN]Pengendalian Program KKBPK				80.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	
[KEGIATAN]Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				626.600.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Orang	331	
[SUBKEGIATAN]Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				6.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	5	
[SUBKEGIATAN]Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				620.600.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	331	
[KEGIATAN]Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				4.618.341.500
[INDKEGIATAN]	Jumlah fasilitas kesehatan yang tercukupi alat dan obat kontrasepsinya	Unit	70	
[SUBKEGIATAN]Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				71.100.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	6	
[SUBKEGIATAN]Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				3.552.565.500
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	4911	

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[SUBKEGIATAN]Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				957.176.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	10	
[SUBKEGIATAN] Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				37.500.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	
[KEGIATAN]Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				4.860.500.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah Kampung KB yang aktif	Desa	180	
[SUBKEGIATAN] Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				9.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dokumen	1	
[SUBKEGIATAN]Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB				4.851.500.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	170	
[PROGRAM]PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				8.569.291.000
[INDPROGRAM]	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	26	
[KEGIATAN]Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				8.569.291.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah Kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan	Kelompok	20	
[SUBKEGIATAN]Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				360.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jenis	2	

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[SUBKEGIATAN]Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				8.004.300.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	1000	
[SUBKEGIATAN]Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				129.991.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	
[SUBKEGIATAN] Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				75.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	10	
[TUJUAN]Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak				
[INDTUJUAN]	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		71.94	
[INDTUJUAN]	Nilai Kabupaten Layak Anak		650	
[SASARAN]Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan				
[INDSASARAN]	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		71.94	
[PROGRAM]PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				620.000.000
[INDPROGRAM]	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.	%	22	
[INDPROGRAM]	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	
[KEGIATAN]Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				18.000.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah OPD yang menerapkan PUG	OPD	29	
[SUBKEGIATAN]Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				18.000.000

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	
[KEGIATAN]Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				372.000.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Orang	11	
[SUBKEGIATAN]Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				177.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	
[SUBKEGIATAN]Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				195.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	30	
[KEGIATAN]Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				230.000.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berperan aktif	lembaga	45	
[SUBKEGIATAN]Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				230.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	
[PROGRAM]PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				225.604.000
[INDPROGRAM]	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[KEGIATAN]Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				95.100.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	Kasus	73	
[SUBKEGIATAN]Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				45.100.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	
[SUBKEGIATAN]Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	3	
[KEGIATAN]Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				100.504.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	Kasus	17	
[SUBKEGIATAN]Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				100.504.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	52	
[KEGIATAN]Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang berperan aktif UPTD Perlindungan Perempuan dan anak	lembaga	1	



Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[SUBKEGIATAN]Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	
[SUBKEGIATAN]Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				5.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	
[PROGRAM]PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				77.000.000
[INDPROGRAM]	Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga	%	0.05	
[KEGIATAN]Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				77.000.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	Keg	2	
[SUBKEGIATAN]Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				77.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	6	
[PROGRAM]PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				7.000.000
[INDPROGRAM]	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%	43	
[KEGIATAN]Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				7.000.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia	Laporan	1	

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[SUBKEGIATAN]Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota				7.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	
[SASARAN]Meningkatkan kualitas perlindungan anak				
[INDSASARAN]	Nilai Kabupaten Layak Anak		650	
[PROGRAM]PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				160.000.000
[INDPROGRAM]	Persentase lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar yang aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	%	100	
[KEGIATAN]Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				160.000.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar dan aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	lembaga	28	
[SUBKEGIATAN]Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				160.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	28	
[PROGRAM]PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				293.196.000
[INDPROGRAM]	Rasio anak korban kekerasan	Angka	0.007	
[KEGIATAN]Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				64.600.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	Kasus	50	
[SUBKEGIATAN]Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				64.600.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[KEGIATAN]Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				154.000.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	kasus	63	
[SUBKEGIATAN]Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				154.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	62	
<b>UPTD</b>				
[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.000.000
[INDPROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah DPPKBP3A	%	100	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				17.000.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola UPTD Perlindungan Perempuan dan anak	Jenis	3	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.000.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia UPTD Perlindungan Perempuan dan anak	Jenis	1	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				8.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	
[PROGRAM]PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				74.596.000

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[INDPROGRAM]	Rasio anak korban kekerasan	Angka	0.007	
[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PPA)				74.596.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang berperan aktif	Lembaga	1	
[SUBKEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PPA)				74.596.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan terhadap output dan pagu indikatif program.

Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Perubahan Rencana Kerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				855.800.000	0	0	0	855.800.000	1.407.800.000	0	0	0	1.407.800.000	552.000.000	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				17.000.000	0	0	0	17.000.000	17.000.000	0	0	0	17.000.000	0	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				215.000.000	0	0	0	215.000.000	620.000.000	0	0	0	620.000.000	405.000.000	
<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				18.000.000	0	0	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		18.000.000	0	0	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>122.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.000.000</b>	<b>372.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		2.000.000	0	0	0	2.000.000	177.000.000	0	0	0	177.000.000	175.000.000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		120.000.000	0	0	0	120.000.000	195.000.000	0	0	0	195.000.000	75.000.000	
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>75.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000.000</b>	<b>230.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000.000</b>	<b>155.000.000</b>	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75.000.000	0	0	0	75.000.000	230.000.000	0	0	0	230.000.000	155.000.000	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				<b>195.604.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.604.000</b>	<b>225.604.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.604.000</b>	<b>30.000.000</b>	
<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>65.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.100.000</b>	<b>95.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.100.000</b>	<b>30.000.000</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		45.100.000	0	0	0	45.100.000	45.100.000	0	0	0	45.100.000	0	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		20.000.000	0	0	0	20.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	30.000.000	
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>100.504.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.504.000</b>	<b>100.504.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.504.000</b>	<b>0</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		100.504.000	0	0	0	100.504.000	100.504.000	0	0	0	100.504.000	0	
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	



Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	
Penduduk dan KB, PP dan PA)															
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>	<b>77.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	
<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>	<b>77.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		45.000.000	0	0	0	45.000.000	77.000.000	0	0	0	77.000.000	32.000.000	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>				<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	
<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+ 1
			T- 1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>				<b>75.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000.000</b>	<b>85.000.000</b>	
<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>75.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000.000</b>	<b>85.000.000</b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kab. Banyumas, Purwokerto		75.000.000	0	0	0	75.000.000	160.000.000	0	0	0	160.000.000	85.000.000	
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	(PAD)	Timur, Semua Kelurahan													
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>				<b>293.196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.196.000</b>	<b>293.196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.196.000</b>	<b>0</b>	
<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>64.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.600.000</b>	<b>64.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.600.000</b>	<b>0</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		64.600.000	0	0	0	64.600.000	64.600.000	0	0	0	64.600.000	0	
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>154.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.000.000</b>	<b>154.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.000.000</b>	<b>0</b>	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			154.000.000	0	0	0	154.000.000	154.000.000	0	0	0	154.000.000	0	
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>74.596.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.596.000</b>	<b>74.596.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.596.000</b>	<b>0</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		74.596.000	0	0	0	74.596.000	74.596.000	0	0	0	74.596.000	0	
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)	Perempuan dan Anak														
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				<b>26.752.494.117</b>	<b>457.732.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.210.226.117</b>	<b>27.626.728.288</b>	<b>452.232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.078.960.288</b>	<b>868.734.171</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>6.541.310.617</b>	<b>46.982.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.588.292.617</b>	<b>7.230.895.788</b>	<b>41.482.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.272.377.788</b>	<b>684.085.171</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>32.049.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.049.455</b>	<b>26.328.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.328.761</b>	<b>(5.720.694)</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		11.015.000	0	0	0	11.015.000	9.540.000	0	0	0	9.540.000	(1.475.000)	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+ 1
			T- 1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		21.034.455	0	0	0	21.034.455	16.788.761	0	0	0	16.788.761	(4.245.694)	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>3.948.631.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.948.631.722</b>	<b>4.295.515.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.295.515.893</b>	<b>346.884.171</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		3.827.671.722	0	0	0	3.827.671.722	4.171.405.893	0	0	0	4.171.405.893	343.734.171	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		120.960.000	0	0	0	120.960.000	124.110.000	0	0	0	124.110.000	3.150.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>507.071.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507.071.000</b>	<b>742.621.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742.621.651</b>	<b>235.550.651</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.483.200	0	0	0	10.483.200	483,200	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		55.000.000	0	0	0	55.000.000	72.102.000	0	0	0	72.102.000	17.102.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		12.000.000	0	0	0	12.000.000	13.563.500	0	0	0	13.563.500	1.563.500	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		220.011.000	0	0	0	220.011.000	256.302.451	0	0	0	256.302.451	36.291.451	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		180.060.000	0	0	0	180.060.000	360.170.500	0	0	0	360.170.500	180.110.500	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>3.018.000</b>	<b>46.982.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>500</b>	<b>41.482.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.482.500</b>	<b>(8.517.500)</b>	
Pengadaan Mebel (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		500	6.999.500	0	0	7.000.000	500	6.999.500	0	0	7.000.000	0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		17.500	39.982.500	0	0	40.000.000	0	34.482.500	0	0	34.482.500	(5.517.500)	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	(3.000.000)	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.807.600.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.807.600.440</b>	<b>1.790.843.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.790.843.983</b>	<b>(16.756.457)</b>	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		83.490.000	0	0	0	83.490.000	80.605.200	0	0	0	80.605.200	(2.884.800)	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		14.000.000	0	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		1.710.110.440	0	0	0	1.710.110.440	1.696.238.783	0	0	0	1.696.238.783	(13.871.657)	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>242.940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.940.000</b>	<b>375.585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.585.000</b>	<b>132.645.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		140.000.000	0	0	0	140.000.000	236.850.000	0	0	0	236.850.000	96.850.000	
Pemeliharaan Mebel (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		77.940.000	0	0	0	77.940.000	93.710.000	0	0	0	93.710.000	15.770.000	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		20.000.000	0	0	0	20.000.000	40.025.000	0	0	0	40.025.000	20.025.000	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>				<b>382.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.200.000</b>	<b>672.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672.600.000</b>	<b>290.400.000</b>	
<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>				<b>141.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.000.000</b>	<b>138.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.000.000</b>	<b>(3.000.000)</b>	
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		100.000.000	0	0	0	100.000.000	97.000.000	0	0	0	97.000.000	(3.000.000)	
Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		19.000.000	0	0	0	19.000.000	19.000.000	0	0	0	19.000.000	0	
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		22.000.000	0	0	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0	22.000.000	0	
<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>241.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.200.000</b>	<b>534.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534.600.000</b>	<b>293.400.000</b>	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	56.960.000	0	0	0	56.960.000	56.960.000	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	293.400.000	0	0	0	293.400.000	293.400.000	
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		226.200.000	0	0	0	226.200.000	169.240.000	0	0	0	169.240.000	(56.960.000)	
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>				<b>11.429.292.500</b>	<b>410.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.840.042.500</b>	<b>11.153.941.500</b>	<b>410.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.564.691.500</b>	<b>(275.351.000)</b>	
<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>				<b>2.294.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.294.050.000</b>	<b>1.459.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.459.250.000</b>	<b>(834.800.000)</b>	
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	118.145.000	0	0	0	118.145.000	118.145.000	



Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dinas Pengendalian	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		866.600.000	0	0	0	866.600.000	41.400.000	0	0	0	41.400.000	(825.200.000)	
Penduduk dan KB, PP dan PA)															
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		471.000.000	0	0	0	471.000.000	352.855.000	0	0	0	352.855.000	(118.145.000)	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		726.450.000	0	0	0	726.450.000	716.850.000	0	0	0	716.850.000	(9.600.000)	
Pengendalian Program KKBPK (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80.000.000	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>				0	0	0	0	0	626.600.000	0	0	0	0	626.600.000	626.600.000	
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat	DAK Non Fisik-BOKB-	Kab. Banyumas, Semua		0	0	0	0	0	620.600.000	0	0	0	0	620.600.000	620.600.000	
Pedesaan (IMP) (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	KB	Kecamatan, Semua Kelurahan														
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>				4.274.742.500	410.750.000	0	0	4.685.492.500	4.207.591.500	410.750.000	0	0	0	4.618.341.500	(67.151.000)	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		71.100.000	0	0	0	71.100.000	71.100.000	0	0	0	0	71.100.000	0	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		3.552.565.500	0	0	0	3.552.565.500	3.552.565.500	0	0	0	0	3.552.565.500	0	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		546.426.000	410.750.000	0	0	957.176.000	546.426.000	410.750.000	0	0	957.176.000	0	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		104.651.000	0	0	0	104.651.000	37.500.000	0	0	0	37.500.000	(67.151.000)	
<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB</b>				<b>4.860.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.860.500.000</b>	<b>4.860.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.860.500.000</b>	<b>0</b>	
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.860.500.000	0	0	0	4.860.500.000	4.851.500.000	0	0	0	4.851.500.000	(9.000.000)	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>				<b>8.399.691.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.399.691.000</b>	<b>8.569.291.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.569.291.000</b>	<b>169.600.000</b>	
<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>				<b>8.399.691.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.399.691.000</b>	<b>8.569.291.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.569.291.000</b>	<b>169.600.000</b>	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		360.000.000	0	0	0	360.000.000	360.000.000	0	0	0	360.000.000	0	
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		7.994.700.000	0	0	0	7.994.700.000	8.004.300.000	0	0	0	8.004.300.000	9.600.000	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto		29.991.000	0	0	0	29.991.000	129.991.000	0	0	0	129.991.000	100.000.000	
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)		Timur, Semua Kelurahan													

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+ 1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	75.000.000	0	0	0	75.000.000	60.000.000	

## BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Perubahan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2023, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perubahan DPPKBP3A Tahun 2023 berpedoman pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. DPPKBP3A dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
3. Perubahan Rencana Kerja DPPKBP3A Tahun 2023 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**.

Purwokerto, 01 Agustus 2023

Kepala DPPKBP3A  
Kabupaten Banyumas



KRISANTO, A.P.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740321 199501 1 001